

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan yang di tegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin program keluarga harapan (PKH) yaitu program bantuan pemberian sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan miskin program penangananganan fakir miskin, memiliki komponen, kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Di dalam penanggulangan kemiskinan itu untuk membiayai tiga program pengentasan kemiskinan, yaitu program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan. Disamping itu harus terpenuhi pula hal-hal sebagai berikut, yakni telah terwujudnya tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah terhadap anak-anak, keluarga bermasalah, janda-janda, penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial serta pertikaian menyangkut SARA. Didalam Implementasi Program penanggualangan kemiskinan maka saya mengambil salah satu dari menaggulangi kemiskinan di kota batam yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka mendiskusikan konsep kesejahteraan lahir bathin tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga moral, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah daerah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Sesungguhnya aspek materi dan rohani bagi kesejahteraan tidak independen satu dengan lainnya, tetapi keduanya sangat berhubungan erat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Suharyanto, dalam Syawie, 2011). Berbicara tentang kemiskinan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen yaitu 25,14 juta Orang Sementara di penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Propinsi Kepulauan Riau pada Maret 2017 meningkat 125.370 orang. Dari data yang diperoleh tim Central Batam di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait jumlah pengangguran saat ini, Batam jelas memperlihatkan data yang fantastik dan memprihatinkan. Menurut Maudy Vera, Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Disnaker Batam, angka pengangguran di Kota Batam mulai tahun 2015-2017 relatif naik. Dimulai dari tahun 2015 angka pengangguran mencapai

14.000, pada tahun 2016 angka pengangguran semakin meningkat menjadi 16.000-20.000. Dan pada tahun 2017, jumlahnya sekitar 24.000 (Central Batam, 2017).

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2014 - Maret 2019 Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada Maret 2019 sebesar 66,21 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama setahun tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,203 ribu orang. Peningkatan atau penurunan persentase penduduk miskin sendiri salah satunya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kenaikan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 1 menyajikan perkembangan Kemiskinan dan juga Garis Kemiskinan pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2019.

Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Tabel 1.1 Jumlah Persentase, dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Kota Batam Maret 2014- Maret 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah)	Persentase Penduduk Miskin (persen)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	61,399	5.3	497,415
2015	59,940	5.08	525,452
2016	57,340	4.68	565,380
2017	61,161	4.81	591,589
2018	67,413	5.11	650,406
2019	66,210	4.85	659,170

(Sumber: Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2018 - Maret 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,35 persen, yaitu dari Rp. 650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 659.170,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Persentase kenaikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2017 - Maret 2018, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,94 persen atau dari Rp. 591.589,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp.650.406,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Batam secara umum pada Maret 2019 ini lebih baik dibanding dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun Garis Kemiskinan mengalami peningkatan tidak menyebabkan penduduk miskinnya menjadi lebih besar.

Tabel 1.2 Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

No.	KELURAHAN	JUMLAH KPM		
		2016	2017	2018
1	Tembesi	176	252	428
2	Sungai Langkai	177	263	440
3	Sungai Lekop	158	413	571
4	Sagulung Kota	204	198	402
5	Sungai Binti	301	479	780
6	Sungai Pelunggut	308	566	874
JUMLAH		1324	2171	3495

(Sumber: Rekapitulasi Data Peserta PKH Dinas Sosial, 2019)

Dari data Keluarga Penerima Manfaat banyak sekali yang harus di teliti berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit diatas, maka peneliti saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi Pada Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sagulung)”**.

1.2 RumusanMasalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam (StudiKasus Pada Program Keluarga Harapan Di KecamatanSagulung)?

1.3 TujuanPenelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Penanggulangaan Kemiskinan Di Kota Batam (Studi pada program keluarga harapan di Kecamatan Sagulung).

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu:

a) Secara Akademis

Secara Teoretis penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang keilmuan terhadap administrasi publik, agar lebih memahami dan mempunyai wawasan terhadap implementasi kebijakan publik.

2) Secara praktis :

a) Untuk peneliti, sangat membantu dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Batam (studi kasus pada keluarga harapan Kecamatan Sagulung).

b) Untuk Pemerintah, ini dapat memberikan masukan kepada Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Batam.